

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Yang mendasari penulisan tentang pengaruh kebijakan luar negeri terhadap popularitas presiden di AS dengan studi komperatif masa Ronald Reagan dan masa George W. Bush, ini karena ada beberapa hal yang menurut penulis sangat menarik.

Pertama, kebijakan luar negeri yang diambil oleh seorang presiden di AS dapat begitu cepat mempengaruhi polling dukungan yang tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh pada popularitas seorang presiden. Apakah kebijakan tersebut membantu pencapaian polling yang tinggi atau justru menjatuhkan dukungan publik terhadapnya.

Kedua, fenomena yang muncul beberapa tahun terakhir di AS adalah semakin kontroversional suatu kebijakan luar negeri maka justru semakin menyebabkan publik dan media massa memberikan perhatian lebih terhadap Presiden tersebut, dan hal itu dapat meningkatkan popularitas seorang Presiden.

Ketiga, popularitas seorang Presiden sangat berhubungan erat dengan citra pribadinya, dimana citra diri sangat penting bagi pembentukan presepsi rakyat Amerika sendiri ataupun presepsi dunia internasional terhadap Presiden tersebut.

B. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Penulis ingin mengetahui dan mendiskripsikan tentang pengaruh kebijakan

kebijakan luar negeri dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai popularitas dan mempertahankan jabatan.

2. Penulis ingin mengetahui lebih jauh pengaruh kebijakan luar negeri terhadap popularitas presiden di AS dengan melakukan studi perbandingan terhadap Presiden Ronald Reagan dan George W. Bush, dimana keduanya dianggap mempunyai arah dan kebijakan luar negeri yang hampir sama dan bagaimana kebijakan luar negeri tetap dapat menyelamatkan masa jabatan mereka.
3. Untuk melengkapi tugas akhir, yaitu penelitian yang akan di jadikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar S-I pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. LATAR BELAKANG MASALAH

Amerika Serikat sebagai negara yang selalu menjunjung tinggi demokrasi memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk mengemukakan pendapat termasuk dalam memberikan opini terhadap kinerja dan semua program yang dijalankan oleh Presiden. Opini masyarakat tersebut kemudian akan menjadi suatu opini publik, dimana opini publik itu selanjutnya dijadikan suatu tolak ukur penentu popularitas bagi seorang Presiden.

Presiden – Presiden Amerika modern mendapatkan sumber kekuasaan lain dalam bentuk dukungan publik. Greenstein menyebutkan bahwa Presiden Amerika merupakan orang Amerika yang paling dikenal. Orang – orang Amerika telah mengenal presiden sejak anak-anak sampai orang dewasa, baik lewat media masa maupun elektronik. Pada masa pemilihan, popularitas presiden semakin

... adalah orang-orang yang paling terkenal

hormat negara – negara lain untuk Amerika dan melindungi kepentingan Amerika dan masa depan negara. Walaupun rakyat Amerika hanya tertarik pada sebagian spesifik isu luar negeri, mereka tetap mempunyai harapan terpendam bahwa Presiden akan memenuhi harapan – harapan itu, kegagalan pemenuhan harapan itu dapat menyebabkan kefatalan politik untuk seorang Presiden.

Pada umumnya Presiden sangat peduli pada popularitas mereka terhadap dukungan penduduk Amerika karena hal itu mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan tugas dengan pengaruh lain dalam proses pengambilan kebijakan. Orang – orang Washington melihat seorang Presiden lebih dari sekedar memikirkan masalah reputasinya, mereka juga harus memikirkan keberadaan Presiden itu dengan publik di luar Washington. Mereka harus mengukur wibawa popularitas seorang Presiden karena mereka memikirkan tentang itu. Keberadaan publik adalah sumber kekuatan bagi seorang Presiden. Singkatnya Presiden yang paling populer adalah Presiden yang paling mungkin menjalankan agenda politiknya. Hal ini yang disebut sebagai ‘wibawa politik.’⁴

Popularitas seorang Presiden terbentuk tidak terlepas dari yang disebut dengan opini publik. Ketika suatu isu tentang rencana kebijakan luar negeri dilontarkan maka akan muncul opini dari publik. Opini akan memberikan tanggapan dukungan atau menolak terhadap isu yang dilontarkan tersebut, sehingga akhirnya akan diputuskan untuk menjalankan rencana kebijakan luar negeri tersebut atau tidak.

⁴ Dennis M. Simon dan Charles W. Ortom (1988) dikutip dari Charles W. Kegley Jr. / Eugene.

Namun pada dasarnya opini publik ini dapat dibentuk dan diarahkan untuk menjadi seperti apa yang diinginkan para pembuat kebijakan, khususnya Presiden. Bahkan ketika hampir sebagian besar opini publik menunjukkan ketidaksetujuan terhadap rencana kebijakan yang dilontarkan tidak jarang kebijakan luar negeri yang telah direncanakan tersebut tetap dijalankan, seperti halnya kasus invasi Amerika oleh Presiden George W. Bush terhadap Irak.

Setelah suatu kebijakan dijalankan, opini publik tidak akan berhenti disitu saja, masyarakat tetap akan memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan tersebut. Jika opini publik menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang sedang dijalankan, hal tersebut dapat menurunkan popularitas Presiden dimata rakyatnya dalam bentuk menurunnya polling dukungan terhadap Presiden.

Hal yang paling fatal yang dapat terjadi akibat menurunnya popularitas Presiden dalam arti dukungan rakyat terhadap masa jabatannya adalah tidak terpilihnya kembali Presiden tersebut pada periode pemilihan selanjutnya atau bahkan tidak dapat menyelesaikan satu periode masa jabatannya karena bisa saja diberlakukan impeachment oleh kongres bila tidak dapat menyelesaikan program kerjanya dengan optimal.

Sejauh ini hal seperti itu belum terjadi di Amerika, justru sebaliknya kebijakan luar negeri yang kontroversial dapat digunakan sebagai alat untuk menarik perhatian publik menjelang waktu pemilihan. Perhatian dan sorotan publik terhadap kebijakan – kebijakan Presiden yang akan mencalonkan diri pada

1. ... popularitasnya yang

tentunya dapat dijadikan prediksi untuk menentukan sikap dan langkah dalam mengambil kebijakan – kebijakan selanjutnya.

Banyak ilmu menggambarkan kekuatan dari publik dan bagaimana hal itu telah memaksa Presiden berada dalam perang dan krisis melawan ketentuan mereka yang lebih baik. Jurnalis Walter Lippman, merasa bahwa ramalan Tocqueville's telah terpenuhi :

*“ The people have imposed a veto upon the judgements of informed and responsible officials. They have compelled the governments, which usually knew what would have been wises, or was necessary, or was more expedient, to be too late with too little, or too long with too much, too parcifist in peace and too long bellicose in war, too neutralist or appersing in negotiation or to intrasigment. Mass opinion has acquired mounting power in this century. It has shown it self to be dangerous master of decisions when the stakes are life and death.”*⁵

Bagaimanapun pemilihan kalimat atau kebijakan populer yang salah dapat menyebabkan seorang Presiden kehilangan citra pribadi. Meski dalam pemilihan umum tidak selalu mengutamakan isu politik luar negeri, tetapi kebijakan luar negeri tetap menjadi bagian yang penting dalam pemilihan umum di Amerika sejak oktober 1968.

Partisipasi pemerintah pada iklim opini dan kepemilikan suara pemilihan umum merupakan keputusan kebijakan luar negeri utama (yang merupakan dua hal yang mempunyai fungsi sangat penting), pengaruh langsung publik terhadap pembuatan kebijakan politik luar negeri sangat kecil. Dalam hal ini melebihi masalah domestik, presiden mempunyai andil yang lebih dominan jika dibandingkan dengan kongres ataupun publik massa. Kemampuan Presiden untuk

⁵ Melvi Small, *Public Opinion dari Encyclopedia of American foreign Policy*, second edition,

D. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian ilustrasi singkat di atas maka dalam tulisan ini dapat ditarik suatu permasalahan :

Bagaimana pengaruh kebijakan luar negeri terhadap popularitas presiden masa Ronald Reagan dan masa George W. Bush di Amerika Serikat ?

E. KERANGKA DASAR TEORI

Teori merupakan penjelasan yang paling umum "*mengapa*" sesuatu terjadi dan "*kapan*" peristiwa tersebut akan terjadi lagi. Dengan kata lain, teori dapat digunakan sebagai alat eksplanasi dan alat prediksi.⁷ Lebih jelasnya teori berfungsi untuk memahami, memberikan kerangka hipotesa secara logis, disamping maksud untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, tanpa keberadaan teori, maka fenomena tersebut serta data-data yang ada sulit untuk dimengerti. Teori juga dapat berubah menjadi pernyataan yang menghubungkan beberapa konsep secara logis dan sistematis.⁸

Sesuai dengan permasalahan dari tulisan ini yang menekankan atas pengaruh kebijakan luar negeri terhadap popularitas presiden di AS, maka penulis menggunakan konsep *Opini Publik dan Teori Legitimasi*, di mana dengan kerangka analisa ini kita dapat melihat lebih jelas pengaruh kebijakan luar negeri terhadap popularitas presiden di AS melalui bentuk *polling* dukungan dengan data statistik yang dapat menunjukkan sejauh mana popularitas seorang Presiden dan juga teori legitimasi untuk melihat bagaimana pandangan rakyat Amerika

⁷ Mohitar Masoed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 217.

⁸ Jack C. Plano and Ry Orton, *The International Relation Dictionary*, Santa Barbara, California, 1992, hal.7.

terhadap suatu kebijakan luar negeri yang melalui suatu jajak pendapat dapat dijadikan salah satu alat untuk melegitimasi kebijakan yang diambil atau yang sedang dirancang oleh pemerintah. Dukungan rakyat melalui *polling* terhadap suatu kebijakan yang dilontarkan menjadi suatu alat legitimasi tidak langsung terhadap tindakan pemerintah.

Legitimasi biasanya diartikan sebagai sumber atau basis dari mana kekuasaan didapat oleh elite atau penguasa. Ini terjadi, jika elite atau penguasa itu merasa perlu meyakini dan mengakui bahwa kekuasaannya berdasarkan sebuah prinsip hak yang mempunyai pembenaran yang kuat. Di masa lalu banyak penguasa atau raja memperoleh dan memperkuat legitimasi kekuasaannya dengan adanya semacam "wangsit" atau wahyu yang turun entah dari mana. Ada pula karena menguasai benda-benda yang dianggap keramat dan mengandung daya magis.⁹

Kemudian legitimasi itu diperkuat oleh rakyat atau kawula yang mendukung sistem kepercayaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, legitimasi kekuasaan seorang raja akan memudar atau menghilang jika benda, sumber legitimasi, berpindah tangan. Seorang raja biasanya sudah mengerti akan kehilangan kekuasaan dengan adanya tanda-tanda simbolis, misalnya bencana alam yang terjadi terus menerus, roh sang penguasa sudah dilihat oleh kawula, atau sesuatu yang aneh mungkin terjadi dalam mimpi. Jika hal ini sudah terjadi,

maka daya magis dan legitimasi sang raja dipercaya sudah memudar dan hilang. Itulah saat bagi sang penguasa untuk siap-siap turun dan menyerahkan tahtanya.¹⁰

Di zaman modern, di sebuah negara yang menggunakan praktek demokrasi, penguasa atau seorang kepala negara diangkat karena dipilih langsung atau tidak langsung oleh mayoritas rakyat. Itulah sebabnya seorang kepala negara dengan mudah memimpin sebuah pemerintahan. Seorang pemimpin yang punya legitimasi tinggi akan mudah membuat berbagai keputusan dari berbagai masalah dan menerapkannya dalam sebuah tatanan hukum. Sebaliknya, jika kepala negara itu sudah kehilangan legitimasi, maka segala perintahnya sudah tidak diterima oleh rakyat.¹¹

Dalam teori legitimasi terdapat pula dengan yang disebut legitimasi rasional atau rational-legal legitimacy¹² yang merupakan legitimasi yang bersumber dari alam nyata, kekuasaan yang diperoleh bersumber dari alam nyata, kekuasaan yang diperoleh bersumber dari sebuah hak yang diberikan kepada presiden oleh wakil-wakil rakyat. Sebuah pemerintahan dijalankan berdasarkan sebuah aturan hukum dan prinsip yang diakui bukan dengan kekerasan meski tidak jarang seorang presiden menggunakan kekuatan militer untuk memperoleh legitimasi dalam pemerintahannya.

Pada pemerintahan otoriter, legitimasi kekuasaan sebuah pemerintahan tidaklah serumit dan sekompleks pemerintahan demokratis. Pada masa itu,

... ..

sekelompok orang mampu meraih kekuasaan tertinggi di dalam masyarakat, termasuk pun melalui kudeta. Dalam perspektif kultural dikenal dengan istilah *pulung* (bahasa Jawa), berarti cahaya suci yang memberi seseorang kekuatan untuk berkuasa. Darinya, legitimasi kekuasaan dengan sendirinya ada, sepanjang kekuasaan itu mampu untuk direbut dan dipertahankan oleh rezim berkuasa.¹³

Sementara itu, mayoritas rakyat, yang *nota bene* merupakan pemilih hanya menjadi penonton dan tidak memiliki kekuatan apa pun untuk mempertanyakan asal usul legitimasi sang penguasa. Rakyat hanyalah sekumpulan massa yang senantiasa dimobilisasi setiap pemilihan umum dan digerakkan hanya untuk memperbarui legitimasi sang penguasa.

Ketika kekuatan otoriter telah sedikit banyak dikalahkan oleh kekuatan pro demokrasi maka, konsep legitimasi kekuasaan dengan sendirinya mengalami metamorfosis. Dengan memakai pengalaman masyarakat liberal, legitimasi kekuasaan itu dengan sendirinya bersifat prosedural. Di mana untuk menggapainya, haruslah melalui prosedur bernama pemilu. Di dalam pemilu, legitimasi kekuasaan kemudian diperlombakan oleh para kandidat. Entah melalui aturan sistem pemilihan: sistem satu ronde atau pun dengan sistem dua ronde. Yang jelas, pemilu telah menjadi satu-satunya "arena pertarungan" di dalam memperebutkan legitimasi dari mayoritas rakyat.¹⁴

Legitimasi muncul dari hukum yang merupakan proses tindakan negara dalam aturan hukum, yang dibagi dalam dua hal: pertama, tindakan tersebut berasal dari kekuasaan yang sah yaitu dari kekuasaan lembaga politik yang

13 * * * * * <https://doi.org/10.24127/ajhs.v1i1.10000> id=60750

Dasar legitimasi Amerika setelah Perang Dunia II mempunyai sedikit tugas untuk menciptakan PBB atau dengan setia mematuhi ajaran hukum internasional yang diatur dalam piagam PBB. Keempat sumber legitimasi Amerika tersebut adalah¹⁸ : *pertama*, hukum resmi sebagai tiang utama legitimasi Amerika. Seperti yang dijelaskan oleh seorang ahli pemikir politik, Kagan bahwa dapat terlihat pada bagaimana Washington menghadapi Moscow. Meskipun perlindungan Amerika terhadap Eropa dari pengaruh Uni Soviet memberikan legitimasi terhadap kekuatan Amerika Serikat namun menurut piagam PBB sebenarnya tindakan agresi tersebut dilarang.

Kedua, sumber legitimasi dari kekuatan Amerika juga ditunjukkan dengan komitmen Washington terhadap model pengambilan keputusan atau yang lebih dikenal dengan 'Washington Consensus', suatu komitmen yang sesungguhnya membendung dari sifat demokratis pemerintahan Amerika yang dicerminkan pada pembangunan lembaga pemerintah sebelum dan setelah perang dunia II. Walaupun sistem pengambilan keputusan kolaboratif yang diinginkan oleh piagam PBB merupakan suatu korban perang dingin, Amerika Serikat tetap mencari suatu kebijakan konsensus yang paling luas bersama sekutu Eropanya atau bila mungkin masyarakat dunia.

Ketiga, sumber legitimasi selanjutnya adalah reputasi Amerika sebagai moderator dalam politik terutama politik internasional. Setelah Perang Dunia II terlihat jelas bahwa Amerika mengasumsikan tanggungjawabnya sebagai penjaga perdamaian dunia, dimana para pemimpin Eropa mulai khawatir bahwa Amerika

¹⁸ Robert W. Tucker and David C.Hendrickson *Op. Cit.*

pada suatu waktu dapat saja kembali pada politik isolasi yang pernah dijalankan. *Keempat*, sumber legitimasi keempat adalah suksesnya Washington dalam pemeliharaan kemakmuran dan perdamaian dengan masyarakat internasional yang mengedepankan demokrasi terindustrialisasi. Meskipun kadang para pemimpin Jepang dan Eropa merasa cemas jika suatu waktu Amerika akan melibatkan mereka dalam persaingannya dengan Uni Soviet.

Legitimasi sangat diperlukan oleh suatu rezim untuk dapat mempertahankan pemerintahannya. Legitimasi biasanya didefinisikan sebagai “pembenaran”, di mana hal tersebut sangat penting untuk membedakan antara kekuatan dan wewenang. Legitimasi adalah kualitas dari transformasi kekuatan yang sebenarnya menuju wewenang yang seutuhnya, hal tersebut memberikan pesan atau perintah sebuah kewenangan atau sifat yang mengikat, memastikan bahwa hal tersebut dijalankan lebih hanya karena rasa takut.¹⁹

Terdapat hubungan yang sangat erat antara legitimasi dan wewenang, sehingga kadang kedua hal tersebut digunakan sebagai sinonim. Sebagaimana kalimat-kalimat tersebut sangat umum digunakan, bagaimanapun kadang orang sering mengatakan wewenang dimana dalam sistem politik sesungguhnya diartikan sebagai legitimasi.

Konsep opini publik menurut Kruger Reckless mempunyai pengertian sebagai pendapat umum yang bersifat relatif, dapat berarti benar dan dapat juga tidak benar, akan tetapi oleh kebanyakan orang dianggap sebagai kebenaran. Opini publik itu dapat berubah-ubah sedangkan perubahan itu ditimbulkan dan

Yang lebih penting dari kepentingan dan pengetahuan adalah apakah orang Amerika dapat secara keseluruhan untuk memegang secara politik kepercayaan politik luar negeri yang relevan. Kepercayaan ini dan tanggapan tingkah laku bahwa baik kabar dan sumber dari mereka yang mungkin tidak memuaskan para analis politik ketika mereka mengevaluasi teori dan praktek dari demokrasi Amerika.

Opini Amerika pada umumnya lebih stabil dan tenang hingga akhir 1960-an, ketika “pemberontakan oleh rakyat” meledak dan sebagian besar rakyat Amerika mulai menganjurkan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia II, pengurangan pada pengeluaran militer (alasan nya tentu saja karena ketidakpuasan pada perang Vietnam). “Pemberontakan” bagaimanapun berubah sangat singkat.²³

Stabilitas tingkah laku publik dan pembelajaran mereka berdemonstrasi adalah dengan syarat berhubungan untuk perubahan, baik yang terjadi di dalam ataupun di luar negeri, semua itu memberikan harapan untuk kepercayaan politik luar negeri yang baru. Meskipun dukungan untuk terlibat secara aktif di permasalahan dunia muncul kembali di tahun 1980-an dari titik terendah pada tahun 1970-an, internasionalisme segera sesudah tragedi Vietnam datang untuk memakai dua wajah yaitu kerjasama dan kekuatan militer. Kerjasama dan kekuatan militer tumbuh berbeda diantara rakyat Amerika tidak hanya pada

Kepercayaan (beliefs) sangat penting untuk memahami mengapa tingkah laku publik sering berubah-ubah dari yang diharapkan. Sistem kepercayaan berlaku seperti 'satu set lensa dimana informasi terfokus pada fisik dan lingkungan sosial yang telah dapat diterima, hal itu berorientasi pada individu terhadap lingkungannya, mendefinisikannya untuk manusia dan mengidentifikasikan untuk manusia yang merupakan sifat yang diam'.²⁵

Pada masa Ronald Reagan dia menyerukan anti-Soviet dan campur tangan kebijakan luar negeri yang melambangkan garis keras kepercayaan kebijakan luar negeri. Tetap saja dia tidak dapat menyelesaikan masukan yang berlawanan untuk beberapa kebijakannya. Contoh terbaik dapat dilihat di Amerika Tengah, dimana meskipun perhatian presidensial mengusahakan untuk menang di kongress namun dukungan publik lebih menggunakan pendekan perang terhadap rejim Sandinista di Nicaragua, yang ternyata masa jabatannya hanya datang sebentar. Contoh tersebut menunjukkan bagaimana opini publik kadang tidak memberikan keleluasaan terhadap ide Presiden pada kebijakan luar negeri, dimana hal tersebut terus menerus memberikan masukan pemikiran diantara elite politik dan publik masa.²⁶

Bagaimanapun sejak periode keduanya Reagan lebih bersikap mendamaikan menghadapi Soviet, mengingatkan kepada orientasi penyesuaian diri dimana dia pada awalnya sangat menolak. Pemerintahannya juga mundur dari orientasi secara sepihak telah menuntun pada kekhawatiran tentang akhir dari

²⁵ *ibid*, hal 274.

internasionalisme, menemukannya pengobatnya pada sejarah multilateralisme berpusat pada ethos internasionalisme.

Meskipun opini publik memberikan ketidak leluasaan terhadap kebijakan luar negeri (dengan membentuk jangka dari pilihan kebijakan yang diinginkan, sebagai contoh) terlalu banyak kepentingan seharusnya tidak dianggap berasal pada batas yang ditentukan. Ketidak leluasaan ini telah dirusak oleh tindakan menyetujui diam-diam hampir sebagian rakyat AS terhadap sebagian inisiatif kebijakan luar negeri. Jika publik memberikan batas terluar dari tindakan politik semua batas itu sangat luas dan elastis.²⁷

Ada keuntungan untuk pembuat kebijakan luar negeri yang diperoleh dari proses demokrasi yang pura-pura. Tingkah laku publik mungkin tidak hanya mengurangi kecenderungan terhadap resiko dan petualangan luar negeri, publik mungkin juga memberi para pembuat kebijakan keuntungan perundingan yang penting ketika melakukan kesepakatan dengan diplomat asing. Opini publik yang paling mempersatukan dan yang paling mendukung kebijakan pemerintah, yang paling kuat adalah kekuatan perundingan pemimpin dengan negara lain. Disini pilihan publik terlihat seperti sumber yang digunakan para pembuat kebijakan dalam membenahan kebijakan luar negerinya.²⁸

Kemampuan media massa untuk membentuk tingkah laku kebijakan luar negeri berkurang oleh kurang perhatiannya media terhadap publik dunia dan

... ..

dibayar untuk menutupi masalah internasional dan program televisi lebih besar berorientasi pada lokal/negara bagian, tidak berita nasional atau internasional.

F. HIPOTESA

Atas dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam menganalisa dan menjelaskan pengaruh kebijakan luar negeri terhadap popularitas Presiden di AS dengan studi komperatif masa Ronald Reagan dan masa George W. Bush dapat ditarik suatu hipotesa :

Kebijakan luar negeri dapat menjadi salah satu faktor dalam upaya pencapaian popularitas seorang Presiden dimana popularitas itu nantinya akan memudahkan dalam pelaksanaan agenda kebijakan lainnya.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Dalam tulisan ini penulis mencoba membatasi sudut pandang permasalahan sesuai dengan studi komperatif yang diambil sehingga hanya mencakup masa jabatan Presiden Ronald Reagan mulai tahun 1980 sampai tahun 1989 dan masa jabatan Presiden George W Bush sejak tahun 2001 hingga pemilu bulan November 2004.

H. METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan studi pustaka (*Library Research*). Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar dan

.....

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Keseluruhan dari bab ini adalah pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai opini publik dan kebijakan luar negeri AS yang terdiri dari penjelasan awal mengenai dasar-dasar politik luar negeri Amerika Serikat, prinsip-prinsip luar negeri Amerika Serikat serta opini publik dan legitimasi.

BAB III : Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan mengenai dasar dan arah kebijakan Ronald Reagan yang di dalamnya akan memuat mengenai riwayat hidup Ronald Reagan, dasar dan arah kebijakan Ronald Reagan secara umum, kebijakan luar negerinya yang berpengaruh terhadap popularitasnya yang didalamnya termasuk masalah ketegangan dengan Uni Soviet, intervensi terhadap Negara-negara Amerika Tengah dan Libya hingga Skandal Iran-Contra yang berpengaruh terhadap penurunan popularitasnya.

BAB IV: Di dalam bab ini penulis akan mengulas tentang dasar dan arah kebijakan George W. Bush, yang didalamnya akan membahas tentang riwayat hidup George W. Bush, dasar dan arah kebijakan George W. Bush secara umum, kebijakan luar negeri yang berpengaruh terhadap popularitasnya yang terdiri dari masalah hancurnya WC dan Pentagon serta penyerangan rezim taliban, Invasi ke Irak, pasca invasi ke Irak dan proyek Rekonstruksi.

BAB V : Pada bab ini akan membahas tentang Analisa kebijakan luar negeri terhadap popularitas presiden di AS dengan melakukan studi komperatif masa Ronald Reagan dan George W. Bush yang didalamnya akan membahas mengenai penegrtian pengaruh kebijakan luar negeri terhadap popularitas presiden, kemudian terdapat pula analisa kebijakan luar negeri Ronald Reagan dan George W. Bush yang disajikan dalam berbagai tabel untuk lebih mempermudah pemahaman.

BAB VI : Bab ini merupakan penjabaran dan kelanjutan dari bab bab

menciptakan opini dan mendominasi kaum oposisi, meyakinkan mereka secara relatif terbebas dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.⁶

Karena pengumpulan informasi yang sangat banyak dan fasilitas penyebaran informasi pada penyelesaian masalah mereka, karena Presiden adalah satu – satunya juru bicara negara. Presiden adalah sumber informasi masalah luar negeri paling penting. Di samping perhatian publik rakyatnya pada masalah internasional yang spesifik, Presiden dapat terus melangkah ke agenda nasional yaitu debat kebijakan luar negeri.

Meskipun komite kongres dan media massa telah mengembangkan kemampuan promosi dan informasi mereka sendiri, sampai akhirnya mereka tidak mempunyai sumber perintah yang tersedia bagi Presiden. Hal ini dimulai sejak akhir dekade abad 20-an dimana berita televisi kabel dan internet tersedia dimana – mana di seluruh dunia, dimulai dari level informasi dan lahan bermain propaganda.

Kemampuan Presiden untuk memimpin kehidupan diplomasi setiap harinya, bebas dari tekanan publik dan terlepas dari kenyataan bahwa banyak penduduk Amerika yang tidak tertarik dengan masalah luar negeri, dimana justru masalah politik yang tidak terlalu di pedulikan oleh publik tersebut yang menjadi isu utama. Jika kebebasan Presiden dalam bertindak dan mengembangkan kebijakan luar negeri tergantung pada perhatian publik, maka kekuatan mereka

⁶ *Journal of American Studies*, 1990, 24, 1, 1-12.

Publik biasanya sangat penting untuk pembuat keputusan setelah kebijakan yang utama di implementasikan. Dalam banyak kasus, biasanya Presiden dapat mengatasi mereka yang menjadi oposisi bagi kebijakan luar negerinya, Presiden beranggapan bahwa hal itu merupakan taktik dukungan .

Presiden biasanya dapat mengendalikan kritik terhadap dirinya karena presiden mempunyai kantor kepresidenan, simbol paling tidak terlihat dari negara Amerika. Banyak yang mungkin secara pribadi mengekspresikan sikap skeptis tentang beberapa kebijakan luar negeri . “ . . . Many who may privately express skepticism about certain foreign policies are reluctant to speak up for fear of insulting the dignity of the presidency and perhaps the prestige of the united State in the international arena . . .” (Melvi Small, 2002, 282)

Terbentuknya suatu opini publik tidak akan terlepas dari pengaruh media, baik media masa ataupun elektronik. Dalam hal ini kita dapat melihat peran media membentuk opini publik terhadap isu kebijakan luar negeri yang muncul ataupun terhadap kebijakan luar negeri yang telah di implementasikan. Pengaruh media terhadap opini publik dapat mempengaruhi dukungan yang akan disampaikan kepada presiden, seberapa besarkah dukungan itu atau justru publik akan menolak kebijakan yang diambil presiden tersebut.

Dalam tulisan ini, penulis mengambil studi perbandingan antara masa pemerintahan Ronald Reagan dan George W. Bush sehingga kita perlu melihat

berwenang. Kedua, tindakan tersebut tidak melanggar undang-undang atau norma moral yang berlaku.¹⁵

Menurut pandangan Weber legitimasi berarti tidak lebih dari pada sebuah kepercayaan dalam “menjalankan aturan”. Dengan kata lain, selama rakyatnya memilih untuk menurut, sebuah sistem peraturan dapat dijelaskan sebagai keabsahaan. Hal ini sangat jauh berbeda dengan pendapat para filosof lainnya, yang mana mencoba mendefinisikan sebuah dasar moral atau rasional untuk legitimasi, dengan demikian akan terlihat perbedaan jelas dan objektif antara bentuk keabsahan dan ketidak absahan suatu aturan. Sedangkan Rousseau menyatakan bahwa pemerintah dapat dikatakan sah bila berdasarkan pada “keinginan publik”.¹⁶

Menurut David beetham menyatakan bahwa kekautan dapat menjadi sah bila memenuhi tiga syarat berikut, yaitu¹⁷ : *pertama*, kekuatan harus telah terbukti berdasarkan aturan yang tak bisa di pungkiri lagi, baik dalam bentuk legal formal atau aturan informal. *Kedua*, aturan tersebut harus telah dibenarkan oleh pengertian yang sama antara pemerintah dan yang diperintah. *Ketiga*, legitimasi harus di tunjukan oleh pernyataan dari persetujuan sebagian rakyat.

Memahami sumber legitimasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia II pada dasarnya hal tersebut membantu mengetahui bagaimana pandangan publik terhadap pemimpin negara tersebut. Terdapat suatu cerita yang konsisten mengenai penggunaan kekuatan Amerika dalam hubungannya dengan hukum internasional.

¹⁵ Robert W. Tucker and David C.Hendrickson, *The Sources Of American Legitimacy*, www.google.com

disalurkan oleh seseorang atau suatu lembaga. Sedangkan alat yang digunakan untuk menyalurkan opini publik biasanya adalah media massa.²⁰

Ada sedikit kekhawatiran bahwa arah opini publik dalam membentuk tingkah laku nasional hanya sedikit dimengerti dan sering dicurigai dan kadang para pembuat kebijakan sering menghinanya. Pandangan John F. Kennedy, seperti yang di gambarkan ajudannya, Theodore C. Sorensen :

*“ Public opinion is often erratic, inconsistent, arbitrary and unreasonable with a compulsion to make mistakes...it rarely considers the need of next generation of the history of the last...it is frequently hampered by myths and misinformation, by stereotypes and shibboleths, and by innate resistance to innovation.”*²¹

Selain pandangan (apakah akuarat atau tidak) kalangan media yang luas, kalangan politikus dan kelompok pribadi sekarang dapat menghabiskan jutaan dolar tiap tahunnya untuk menentukan apa yang rakyat Amerika pikirkan dan apa pendapat mereka.

Penampakan yang sudah jelas kebenarannya dari pentingnya tingkah laku politik di dunia sekarang ini menjelaskan paksaan untuk mengukur, memanipulasi dan menjadi inti utama dari opini publik. Seperti penelitian yang dilakukan seseorang : “ Para politikus mengadilinya, ada pernyataan menyerukannya, para filosof memuji dan menyalahkannya, para pengusaha melayaninya, pemimpin militer takut padanya, para sosiolog menganalisanya, para pembuat data statistik mengukurnya dan para pembuat perundangan mencoba membuatnya berkuasa.”²²

²⁰ Disimpulkan dari Sunarjo, Djoenaesih S, *Opini Publik*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta, 1984. hal.29.

²¹